

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah yang terjadi di Indonesia menyebabkan pemerintah daerah untuk semakin meningkatkan pelaporan dan pengungkapannya terhadap masyarakat karena urusan pemerintah daerah yang sebelumnya sebagian besar ditangani oleh pemerintah pusat. Otonomi daerah ini diikuti dengan reformasi keuangan, sehingga akuntabilitas dan transparansi mulai diwujudkan dalam pelaksanaan pemerintah.

Akuntabilitas sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan daerah baik dalam kinerja maupun pelaporan keuangan. Akuntabilitas diyakini mampu merubah kondisi suatu pemerintahan, dari kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korup menuju suatu tatanan yang demokratis. Untuk mewujudkan tercapainya akuntabilitas dan transparansi, pemerintah mengungkapkan berbagai bentuk informasi dalam laporan keuangan. Salah satu upaya kongkrit pemerintah daerah untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangannya adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diterima secara umum.

Data dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia(BPK) menunjukkan bahwa LKPD Kab/kota diprovinsi Jawa Tengah mulai tahun 2014 sampai tahun 2016 masih dibawah 70% yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Hal tersebut hampir sama dengan hasil audit BPK secara nasional dimana pemerintah daerah belum dapat menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang ada. Salah satu faktor yang mempengaruhi opini BPK adalah pengungkapan wajib dalam laporan keuangan.

Akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah desentralisasi fiskal, kinerja dan umur pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal merupakan komponen inti dari desentralisasi karena untuk menjalankan kewenangan yang telah ditransfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah diperlukan sumber pembiayaan yang memadai. Desentralisasi fiskal dapat diartikan pula sebagai penyerahan fungsi pengeluaran dan pendapatan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dengan adanya desentralisasi fiskal maka terdapat pemisahan yang jelas dan tegas dalam urusan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Faktor lainnya adalah kinerja, akuntabilitas kinerja merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia karena perbaikan akuntabilitas kinerja dapat berdampak pada upaya terciptanya *Good Governance* (Pambelum dan Urip, 2008). Dalam sistem pemerintahan, organisasi pemerintah menjalankan roda pemerintahan yang legitimasinya berasal dari rakyat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintah harus diimbangi dengan kinerja yang baik, sehingga pelayanan dapat ditingkatkan secara efektif dan menyeluruh pada masyarakat (Ramandei, 2009). Keberhasilan kinerja penyelenggara pemerintah daerah dapat dinilai dari pembangunan baik di bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Dewasa ini, masyarakat dapat dengan mudah mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh penyelenggara pemerintah, sehingga menuntut pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya dalam hal pelayanan kepada masyarakat (Damanik, 2011). Agar kinerja penyelenggara pemerintah memuaskan, pemerintah melakukan evaluasi penyelenggara pemerintah karena ini merupakan proses pengawasan secara berkelanjutan dan pelaporan capaian kegiatan pemerintah daerah.

Selain desentralisasi dan kinerja, umur pemerintah daerah juga merupakan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pelaporan keuangan. Semakin tua umur pemerintahan daerah maka semakin berpengalaman dalam melakukan pelaporan dan pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah. Umur suatu pemerintah daerah dimulai dari tahun didirikannya suatu pemerintah daerah berdasarkan undang-undang pembentukan suatu daerah.

Pemerintah daerah yang telah lama berdiri memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Setyaningrum & Syafitri (2012) menjelaskan bahwa laporan keuangan tahun sebelumnya telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) dan hasil evaluasinya akan ditindak lanjuti untuk memperbaiki penyajian laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sehingga menuntut pemerintah daerah untuk lebih baik lagi dan lebih berpengalaman dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian mengenai akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya Waliyyani & Mahmud (2015) menyatakan karakteristik Pemda yang terdiri dari variabel ukuran pemda berpengaruh positif tidak signifikan, umur pemda berpengaruh positif signifikan, *leverage* berpengaruh negatif signifikan, sedangkan temuan audit dan *IRGROW* berpengaruh negatif tidak signifikan. Purbasari & Banowo (2017) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan, hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fontanella & Rossieta (2014) dan Nurhidayati (2017) yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan.

Hasil-hasil penelitian yang tidak konsisten memotivasi peneliti untuk menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pelaporan keuangan di pemerintah daerah. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Fontanella & Rossieta (2014), Waliyyani & Mahmud(2015), Dyah & Febriani (2012), Erryana & Setyawan (2016), Mudhofar & afrizal(2016), Purbasari & Banowo (2017). Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada daerah Jawa Tengah.

1.2 Perumusan Masalah

Akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan daerah merupakan tujuan penting dari reformasi sektor publik (Mardiasmo, 2004). Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk mengetahui, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya. Akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah ini sendiri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain desentralisasi fiskal, kinerja dan umur pemerintah daerah.

Berdasarkan *reseach gap* yang dikemukakan diatas ditemukan masalah, “*masih adanya ketidakkonsistenan temuan hasil penelitian mengenai peran desentralisasi fiskal dan kinerja dalam meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, disatu sisi desentralisasi fiskal dan kinerja menjadi pendorong penting dalam meningkatkan akuntabilitas, tapi di sisi lain ditemukan keduanya bukan penentu akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah*”. Oleh karena itu, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “*Bagaimana mengatasi kesenjangan penelitian mengenai peran desentralisasi fiskal dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah?*”.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan masalah antara lain:

1. Bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan?
2. Bagaimana pengaruh kinerja pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan?
3. Bagaimana pengaruh umur pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh:

1. Desentralisasi fiskal terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan.
2. Kinerja pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan.
3. Umur pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, diharapkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini akan memberikan manfaat positif bagi:

1. Aspek teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi mengenai pentingnya penerapan akuntabilitas dalam laporan keuangan pemerintah daerah dan dapat menjadi acuan penelitian selanjutnya yang relevan.

2. Aspek Praktis

Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan akuntabilitas pelaporannya sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap publik.